

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan penduduk yang semakin cepat dan dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan beberapa masalah baru dan salah satu masalah tersebut adalah masalah pengangguran (Sukirno,1985). Menurut Nanga (2005), pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Simanjuntak (1985), pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja, memiliki usia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu berusaha memperoleh pekerjaan.

Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999) Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan.

Dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia 6,5 % merupakan pengangguran, yang di lansir BPS pada januari 2014. Pengangguran menjadi salah satu masalah serius karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu

mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2007).

Besarnya jumlah pengangguran menjadi sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Jumlah pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2008 sampai 2013 selalu mengalami fluktuasi jumlah pengangguran terbuka setiap tahunnya. Jumlah Pengangguran terendah terjadi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011 sejumlah 14719 jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran tertinggi terjadi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2009 sejumlah 42690 jiwa.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pengangguran Eks-Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2008 - 2013**

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Boyolali</b>	23997	28809	20575	25568	26573	32844
<b>Klaten</b>	34124	38758	25854	37395	22801	33649
<b>Sukoharjo</b>	36367	37377	32007	23860	25599	27029
<b>Wonogiri</b>	38857	42690	34404	27659	30557	35641
<b>Karanganyar</b>	19444	26051	21514	14719	15933	23360
<b>Sragen</b>	26292	28608	19776	26160	26432	27040
<b>Surakarta</b>	18076	20445	22573	16537	16919	20100

*Sumber : BPS Kota Surakarta 2014*

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Eks-Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2008 - 2013**

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Boyolali</b>	938469	943978	930531	936822	953317	951817
<b>Klaten</b>	1133012	1136829	1130047	1134201	1153047	1148994
<b>Sukoharjo</b>	826699	833575	824238	832094	848718	849506
<b>Wonogiri</b>	982730	985024	928904	929870	946373	942377
<b>Karanganyar</b>	812432	819186	813196	821694	839762	840171
<b>Sragen</b>	860509	862910	858266	861939	875283	871989
<b>Surakarta</b>	498504	498904	499370	499770	500171	507825

*Sumber : BPS Kota Surakarta 2014*

Tabel 1.2 di atas merupakan data Jumlah penduduk Eks-Karesidenan Surakarta. Dimana jumlah penduduk selalu mengalami perubahan baik bertambah maupun berkurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti : kelahiran, kematian, migrasi maupun urbanisasi. Dari data tersebut akan dilakukan penelitian, apakah jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan mutlak (Todaro, 1988).

Menurut Amir (2007) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian wilayah atau negara tersebut berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi yang positif bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Menurut Tambunan (2009), Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut ,yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan penambahan GDP, GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu negara (Mankiw, 2000).

Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999), menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada presentase tingkat pengangguran di suatu Negara maka hal tersebut setara dengan terjadinya penurunan terhadap GDP sebesar 2 persen. Menurut Mankiw (2006) Hukum Okun adalah relasi negatif antara pengangguran dan GDP.

Hukum okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum okun merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam tingkat pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP riil yang mendekati 2 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendah tingkat pengangguran suatu negara dapat dikaitkan dengan GDP negara tersebut.

Pada table 1.3 di bawah ini dapat diketahui mengenai laju PDRB Eks-Karesidenan Surakarta dari tahun 2008 sampai tahun 2013 menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB tidak sepenuhnya memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Eks-Karesidenan Surakarta. Masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah PDRB Eks-Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2008 - 2013**

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Boyolali</b>	3899372.86	4100520.26	4248048.20	4472217.00	4725558.65	4982065.57
<b>Klaten</b>	4567200.96	4761018.67	4843247.28	4938050.65	5211757.15	5513307.86
<b>Sukoharjo</b>	4540751.53	4756902.50	4978263.31	5206687.70	5468708.95	5743876.93
<b>Wonogiri</b>	2770435.78	2901577.44	2998123.41	3134182.28	3325850.97	3470048.41
<b>Karanganyar</b>	4921454.71	5076549.88	5752064.99	5452432.49	6086877.13	6414504.10
<b>Sragen</b>	2729450.32	2893427.21	3068863.66	3270052.54	3485992.03	3717488.14
<b>Surakarta</b>	4549342.95	4817877.63	5103886.25	5411912.32	5742861.31	6080954.07

*Sumber : BPS Kota Surakarta 2014*

Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Menurut Mankiw (2000) upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Teori penetapan upah dalam suatu pasar bebas sebenarnya merupakan kasus khusus dan teori nilai umum. Upah adalah harga tenaga kerja. Menurut Gilarso (2003), upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah atau gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.

Menurut Boediono (1991), upah minimum regional merupakan upah minimal yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-rata propinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum diseluruh propinsi (statistik Indonesia, 2007).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asep Suryahadi, dkk (2003), peningkatan pada upah minimum akan memiliki dampak yang buruk pada tenaga kerja sektor formal di perkotaan, kecuali pada pekerja "*white-collar*". Jika peningkatan dalam upah minimum mengurangi pertumbuhan tenaga kerja pada sektor modern di bawah pertumbuhan pada populasi angkatan kerja, maka akan semakin banyak pekerja yang tidak terampil akan dipaksa untuk menerima upah yang lebih rendah dengan kondisi kerja yang buruk dalam sektor informal. Di samping itu, peningkatan upah juga dapat menyebabkan

bertambahnya pengangguran karena perusahaan mengambil kebijakan efisiensi pekerja.

Pada tabel 1.4 menjelaskan perubahan upah minimum regional di Eks-Karesidenan Surakarta yang diterima pekerja setiap bulanya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, upah yang ditetapkan oleh pemerintah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 1.4**  
**UMR Eks-Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2008 – 2013**

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Boyolali</b>	622000	718500	748000	800500	836000	895000
<b>Klaten</b>	607000	685000	735000	766022	812000	871500
<b>Sukoharjo</b>	642000	710000	769500	790500	843000	902000
<b>Wonogiri</b>	585000	650000	695000	730000	775000	830000
<b>Karanganyar</b>	650000	719000	716000	801500	846000	896500
<b>Sragen</b>	607000	687000	724000	760000	810000	864000
<b>Surakarta</b>	674300	723000	785000	826252	915900	915900

*Sumber : BPS Kota Surakarta 2014*

Menurut Sukirno (1994), Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian suatu negara atau wilayah. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi tingkat kenaikan harga barang dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat inflasi dapat berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Inflasi selalu menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang



perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 - 4 persen per tahun. Dengan persentase sebesar itu, dapat dikatakan inflasi yang rendah. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi berkisar lebih dari 30 persen . Namun demikian ada negara yang menghadapi tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiper inflasi. Jika suatu negara mengalami hiper inflasi bisa dipastikan jumlah pengangguran di negara tersebut akan bertambah secara drastis. Karena dengan kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan dapat membuat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Oleh karena itu, inflasi berkaitan dengan tingkat pengangguran.

Tabel 1.5 menggambarkan tentang hubungan antara tingkat inflasi di Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

**Tabel 1.5**  
**Inflasi Eks-Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2008 – 2013**

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Boyolali</b>	6.51	2.05	7.34	3.35	4.45	8.21
<b>Klaten</b>	10.33	3.82	6.51	3.17	3.65	7.92
<b>Sukoharjo</b>	11.39	2.59	6.67	2.63	4.22	8.42
<b>Wonogiri</b>	11.54	2.89	6.66	3.00	3.43	8.60
<b>Karanganyar</b>	10.83	2.96	7.35	3.31	3.29	8.70
<b>Sragen</b>	10.82	2.82	6.77	2.86	3.74	7.55
<b>Surakarta</b>	8.52	2.63	6.65	1.93	2.87	8.32

*Sumber : BPS Kota Surakarta 2014*

Pada tabel 1.5 tingkat inflasi paling tinggi terjadi pada Kabupaten Wonogiri tahun 2008 sebesar 11.54%, sedangkan tingkat inflasi paling rendah terjadi di Kota Surakarta pada tahun 2011 sebesar 1.93%.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu, maka peneliti akan mencoba kembali variable yang sebelumnya pernah diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, UPAH MINIMUM REGIONAL, DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN DI EKS-KARESIDENAN SURAKARTA PERIODE TAHUN 2008 – 2013”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap jumlah penganggurandi Eks-Karesidenan Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta dalam periode tahun 2008 hingga 2013 ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta dalam periode tahun 2008 hingga 2013?
3. Bagaimana pengaruh UMR perkapita terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta dalam periode tahun 2008 hingga 2013?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta dalam periode tahun 2008 hingga 2013?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta dalam rentang tahun 2008 hingga 2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta dalam rentang tahun 2008 hingga 2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh UMR perkapita terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta dalam rentang tahun 2008 hingga 2013.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi suatu negara terhadap tingkat pengangguran di Eks-Karesidenan Surakarta dalam rentang tahun 2008 hingga 2013.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi praktisi

Bagi praktisi khususnya pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak yang mempengaruhi pengangguran. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan bagi pemerintah yang akan menentukan kebijakan yang akan di ambil untuk mengurangi jumlah pengangguran.

2. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis pada faktor yang mempengaruhi jumlah

pengangguran khususnya pengetahuan yang sifatnya empiris, pengetahuan empiris ini akan bermanfaat sebagai pelengkap dari pengetahuan teoritis yang dimiliki penulis tentang faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran.

### 3. Manfaat bagi pembaca

Pembaca akan mendapat tambahan ilmu dan referensi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran bagi pemerintah yang diharap dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai referensi atau untuk melanjutkan penelitian ini.